

**PAKET KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PERBANKAN SYARIAH**

**Mohammad Irwansyah Panjaitan**

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran

email: irwanpanjaitan@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study is merely a description with reference to some of the literature that has terakai theme of Islamic banking. Support development of Islamic banking by the Government to issue a "V Package of Economic Policy". Strength, which is owned by the institute of Islamic banking in Indonesia through law and policy economists V package is including; residents of predominantly Muslim Indonesia, commitment and support from the government, the support of the overall Islamic financial institutions incorporated in the Islamic world, and the concept inherent (build-in concept) Islamic bank in accordance with the needs of development. Weakness, which is perceived; controversy over the existence and operational system of Islamic banks, still lack understanding of the community about the product and the benefits of Islamic banking (an average of just 11%), the limited service network of Islamic banks and has not yet reached all the centers of economic activity, the success of the sharing system is highly dependent the honesty of customers and islamic banks are very vulnerable to those who in good faith, so require accuracy calculate the results, especially for the customers / members that the number of deposits were never fixed, the sharing system is in need of accuracy in counting compared with conventional systems, and islamic banks are still relatively new so it still takes time for the people to adapt.*

**Keywords:** Package, Policy, Economics, Banking, Syariah

**PENDAHULUAN**

Globalisasi ekonomi yang dihadapi dunia berimbas kepada Indonesia. Tantangan ekonomi tersebut pada tahun 2015 disikapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan beberap kebijakan ekonomi yang sangat strategis untuk dapat membendung hal yang negati bagi kestabilan ekonomi dalam negeri. Strategi yang dikeluarkan adalah memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi baik tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Langkah strategi tersebut ditandai dengan pergerakan menjaga dan meningkatkan performen indikator ekonomi baik secara fiskal maupun secara moneter yang merupakan unsur dari makroekonomi. Kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah agar mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan dan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya. Namun, ternyata dalam perkembanganya perekonomian global terkini turut juga terkoreksi memberikan dampak signifikan terhadap beberapa indikator makroekonomi tersebut.

**Tabel.1 Statistik Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Tahun 1998- 2015**

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan PDB(%)
1998-1999	-6,65
2000-2004	4,60
2005-2009	5,62
2010-2015	5,63

Sumber: Bank Dunia

Tampak dalam tabel di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi 4,6%, yang berarti bahwa performa pertumbuhan PDB negara ini merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia (dan memiliki peringkat tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G-20).

Pada tahun 2010, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Di 2012, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 75 juta orang (dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta orang) dan perusahaan penelitian seperti Boston Consulting Group (BCG) dan McKinsey menyatakan bahwa kelompok kelas menengah ini akan bertambah kira-kira dua kali lipat pada tahun 2020-2030. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah telah berkurang karena perlambatan perekonomian negara ini yang terjadi di antara tahun 2011-2015, Indonesia memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah

secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

Ini akan sangat mempengaruhi tingkat suku bunga BI. Berkaitan dengan hal tersebut BI akan mengoreksi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi membatasi pertumbuhan kredit dan karenanya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sejak pertengahan tahun 2013, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) meningkatkan suku bunga acuannya (BI rate) dari level terendah dalam sejarah pada 5,75% kemudian secara bertahap, namun agresif, naik menjadi 7,75% di akhir 2014. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dalam rangka melawan inflasi yang tinggi (yang meningkat tajam setelah beberapa reformasi subsidi bahan bakar), mengurangi defisit transaksi berjalan yang lebar, dan mendukung rupiah yang telah dibebani oleh tekanan-tekanan berat karena pengetatan moneter di Amerika Serikat (maka Bank Indonesia lebih memilih stabilitas finansial dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi). *Capital outflows* besar-besaran dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi di sebagian besar waktu di tahun 2013 karena ancaman penurunan program pembelian obligasi senilai 85 miliar dollar Amerika Serikat (AS) setiap bulannya (*quantitative easing* AS). Pada tahun 2015, *capital outflows* dari negara-negara berkembang muncul kembali karena dunia sedang bersiap-siap untuk suku bunga AS yang lebih tinggi. Pada bulan Desember 2015 Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya dalam satu dekade (diikuti oleh kenaikan suku bunga lagi pada bulan Desember 2016). Namun, karena inflasi Indonesia dan defisit transaksi berjalan turun ke tingkat yang aman, sedangkan rupiah stabil terhadap dolar AS mulai dari akhir-2015, Bank Indonesia akhirnya bisa melonggarkan kebijakan moneter. Sepanjang 2016 Bank sentral Indonesia mampu menurunkan suku bunga secara drastis dari level 7,75 persen pada awal 2016 menjadi 4,75 persen pada akhir 2016 (ini juga termasuk perubahan dari BI rate ke BI 7-day Reverse Repo Rate sebagai alat benchmark bank sentral), maka memungkinkan aktivitas ekonomi yang lebih cepat.

Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam merilis strategi kebijakan ekonomi baru untuk bisa

memperbaiki perekonomian secara menyeluruh. Strategi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menti Koordinasi Ekonomi disebut dengan “Paket V Kebijakan Ekonomi”. Paket kebijakan tersebut berisikan adalah, pertama adalah revaluasi aset untuk keringanan pajak fungsinya adalah menyadarkan para wajib pajak agar taat pajak demi meningkatkan pembangunan nasional. Kedua, menghilangkan pajak berganda adalah untuk menarik dana yang selama ini diinvestasikan di luar negeri dan mendorong pertumbuhan investasi di bidang infrastruktur dan real estate. Ketiga, adalah mendorong pertumbuhan perbankan khususnya perbankan syariah untuk menyederhanakan izin-izin produk perbankan khususnya syariah. Sebab jika investasi ingin ditumbuhkan maka perbaikan sistem perbankan harus dijadikan tumpuan agar menarik investor datang ke Indonesia. Maka pertumbuhan sektor lain turut mengalami koreksi bergerak tumbuh mengikuti instrumen sektor perbankan.

Untuk menarik benang merah dari pertumbuhan pergerakan yang terjadi pada perekonomian Indonesia, maka tulisan ini ingin melihat bagaimana pertumbuhan perbankan syariah sebagai salah satu instrumen yang dirilis Pemerintah untuk menjadi generator perubahan ekonomian.

## KAJIAN TEORI

Beberapa peneliti yang sangat konsen melihat tumbuh kembang yang terjadi dalam pergerakan perbankan syariah diantaranya, oleh Peneliti Yuli Andriansyah (2009:195), bahwa secara umum pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh pranata hukum yang memadai baik dari aspek legalitas hukum nasional, hukum Islam, maupun dukungan peraturan pendukung operasionalnya. Analisa terhadap data yang digunakan dalam paparan diatas juga menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang menggembarakan meskipun perannya masih perlu untuk terus dikembangkan. Perbankan syariah juga telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam

pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya.

Selanjutnya, menurut A.A.Miftah (2011:238), meneliti bank-bank syariah yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan ekonomian di Jambi. Perbankan syariah telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan perekonomian Indonesia secara umum dan perekonomian dunia Melayu Jambi secara khusus. Provinsi Jambi sangat terbuka dan merupakan pasar yang potensial bagi pengembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syari'ah dan selalu memberikan dukung dalam bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang berbasis syari'ah.

Menurut Ali Rama (2013), dengan penelitian yang berjudul "Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" melihat bahwa melihat hubungan yang terjadi secara dinamis antara perkembangan perbankan syariah, pasar modal, perdagangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mengunakan data time series, menemukan hal menarik yaitu hubungan yang seimbang dalam jangka panjang antara bank-bank syariah, pasar efek/modal, perdagangan, inflasi hingga pertumbuhan ekonomi. Dalam uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang dua arah antara pertumbuhan dengan bank-bank syariah di Indonesia. Hasil VDCs menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada variasinya sendiri. Penelitian menyimpulkan bahwa variasi pembiayaan bank syariah dapat menjelaskan secara signifikan variasi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, pihak terkait harus menyediakan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Sedangkan, menurut penelitian Rizki, dan Fakhuddin (2015:52-53), bahwa untuk menginvestigasi peran intermediasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode penelitian 2000:Q4 sampai 2012:Q4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SBIS. Pengaruh yang ditimbulkan dapat

dijelaskan sebagai berikut: 1. Kebijakan Bank Indoensia dalam menawarkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) kepada perbankan syariah berpengaruh terhadap total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dan perkembangan sektor riil Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh SBIS, hal ini dapat terjadi karena SBIS merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam mengontrol liquiditas pada bank syariah yang kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. 3. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berpengaruh terhadap kesemua variabel dalam penelitian ini yakni, SBIS, pertumbuhan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 4. Perkembangan aktivitas perdangan hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dipahami dengan meningkatnya aktivitas perdagangan maka produk domestik broto (PDB) akan bertambah, dan ini menjadi cerminan dari pertumbuhan ekonomi. 5. Pertumbuhan ekonomi hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. 6. *Shock* yang terjadi pada pembiayaan berpengaruh terhadap SBIS dan pertumbuhan sektor riil pada jangka pendek. 7. *Shock* yang ditimbulkan oleh pertumbuhan sektor riil tidak berpengaruh terhadap SBIS, pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 8. *Shock* yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap kesemua variabel dalam penelitian ini. 9. *Shock* yang terjadi pada SBIS hanya mempengaruhi variabel pembiayaan. Respon pembiayaan terhadap shock SBIS sangat cepat dirasakan yakni, pada kuartal pertama. 10. Pembiayaan perbankan syariah berkontribusi sebesar 14 persen terhadap SBIS. Sedangkan variabel trade dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi di bawah dibawah 5 persen. Hal ini dapat di mengerti karena SBIS merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang idependen. 11. SBIS memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah yakni mencapai 52 persen. Variabel pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi hanya berkontribusi sangat kecil terhadap *shock* pembiayaan. 12. Diantara ketiga variabel penelitian, kontribusi yang cukup besar diberikan oleh pembiayaan terhadap

petumbuhan sektor riil mencapai 19 persen dalam periode penelitian. Ini membuktikan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan aktivitas perdagangan. 13. Keseluruhan variabel dalam penelitian ini mempengaruhi *shock* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi. SBIS memberikan kontribusi mencapai 27 persen, pertumbuhan sektor riil mencapai 17 dan pembiayaan mencapai 16 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu dari sektor riil maupun sektor keuangan.

Selanjutnya, menurut laporan perkembangan perbankan syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 bahwa melihat perkembangan pertumbuhan perbankan syariah yang masih didominasi struktur asetnya sekitar  $\pm 98\%$  oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif cukup baik, tercermin dari : (i) fungsi intermediasi berada pada tingkat yang optimal dengan rata-rata FDR sebesar 97,16%; (ii) tingkat kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% dengan rata-rata CAR sebesar  $\pm 15,17\%$ ; dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) masih di bawah 5% dengan rata-rata sebesar 2,72% dan bahkan untuk posisi Desember 2012 mencapai 2,22%. Walaupun begitu, dari sisi pertumbuhan aset, terjadi perlambatan aset industri yang relatif signifikan pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2012, lebih karena penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tajam. Penurunan ini disebabkan antara lain karena penarikan dana simpanan milik pemerintah (Kementerian Agama) dari bank syariah yang cukup besar, dimana dialihkan ke Sukuk Dana Haji Indonesia guna memenuhi target pendanaan pembangunan. Namun pada bulan-bekutnya, DPK dan aset bank syariah mengalami peningkatan kembali. Dengan demikian, perlambatan pertumbuhan industri perbankan syariah lebih akibat kondisi domestik. Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir cukup mengembirakan, dimana total asetnya meningkat menjadi Rp. 199,72 triliun dan melebihi proyeksi moderat tahun sebelumnya sebesar Rp. 187,2 triliun. Sementara itu, dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan

syariah, Bank Indonesia juga terus melakukan penelitian dan pengembangan baik secara internal bekerja sama dengan lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pengawasan dan pemeriksaan perbankan syariah tahun 2012 diarahkan untuk memastikan ketahanan perbankan syariah terhadap risiko dan difokuskan kepada area-area yang cenderung berisiko dan menjadi perhatian masyarakat, termasuk diantaranya dengan melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap teknologi informasi (TI), pemeriksaan khusus atas pembiayaan beragun emas, dan pemeriksaan atas produk baru yang diajukan bank (pembiayaan mikro). Pada tahun 2012, Bank Indonesia juga menerbitkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat edaran, antara lain mengenai penyempurnaan pedoman pengawasan terkait GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUS, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BPRS, dan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan UUS. Bank Indonesia juga melihat semakin berkembangnya produk dan jasa perbankan syariah pada tahun 2012, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan permohonan produk dan jasa baru, baik yang dikategorikan sebagai permohonan produk/jasa baru maupun sebagai laporan atas produk/jasa baru yaitu meningkat sebesar 30% dibanding tahun 2011, dimana permohonan produk di sisi pembiayaan lebih besar dibandingkan sisi pendanaan. Dalam rangka proses pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan program edukasi dan promosi perbankan syariah kepada berbagai kalangan dalam berbagai even, baik atas inisiatif Bank Indonesia sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholders lain. Kegiatan dimaksud, tidak hanya dilakukan di dalam negeri namun juga dilaksanakan di luar negeri seperti pelaksanaan training of trainers, seminar internasional maupun pengiriman narasumber ke luar negeri untuk lebih mengenalkan framework pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia.

#### a. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat

pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (Grafik1). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan nonbank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat.

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negaranegara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas.

Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya

adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju *global player* juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar (Tabel 1). Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US\$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini hanya bersifat mendeskripsikan berkaitan dengan perkembangan sektor perbankan syariah dengan tujuan memberikan masukan atau ide pemikiran kepada perkembangan dunia praktis dan akademisi.

### 1. Data Dan Fakta

Kinerja perbankan syari’ah sejak mulai beroperasi pada tahun 1992 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator, seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang diberikan. Peningkatan ini terjadi selain karena dorongan permintaan masyarakat terhadap jasa perbankan syari’ah, juga didukung oleh terus membaiknya kondisi moneter dan semakin kondusifnya kebijakan perbankan.

Dorongan permintaan masyarakat semakin kuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dikenakan bunga, baik atas simpanan dan pinjaman masyarakat maupun atas penggunaan jasa-jasa perbankan lainnya. Meskipun tidak dapat

dijelaskan seberapa besar pengaruhnya secara kuantitatif, namun paling tidak fatwa tersebut akan memengaruhi persepsi dan keyakinan masyarakat, terutama umat Islam yang sangat religius. Implikasinya, perilaku masyarakat ini dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan akan bergeser dari sebelumnya menggunakan produk dan jasa perbankan konvensional ke perbankan syariah. Pergeseran perilaku ini selain mendorong bertambahnya permintaan atas produk dan jasa perbankan syariah, juga merangsang dunia perbankan untuk memperluas produk dan jaringan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara kelembagaan, dalam periode 2004 – 2007 (pasca-fatwa MUI), jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bertambah menjadi 3 bank umum syariah, dibandingkan periode sebelum fatwa (2000-2003) hanya 2 bank umum syariah. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya konversi 1 bank umum konvensional (Bank Tugu) menjadi bank umum syariah (Bank Syariah Mega Indonesia). Demikian pula jumlah unit usaha syariah (UUS) pada bank umum konvensional bertambah dari 8 UUS pada tahun 2003 menjadi dan 26 UUS pada tahun 2007.

Sementara data terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Jenis layanan perbankan syariah dalam jumlah bank dan jumlah kantor yang dibuka untuk melayani aktivitas tersebut. Pergerakan pertumbuhan yang ditunjukkan dari Bank Umum Syariah dalam jumlah dari tahun 2009 yang berjumlah 6 bank meningkat ditahun 2015 sekitar 100% atau sebesar 12 bank. Selanjutnya jumlah kantor yang dimiliki Bank Umum Syariah dari tahun 2009 sebesar 711 kantor cabang meningkat sebesar 33,52% ditahun 2015 atau sekitar 2.121 kantor cabang.

Sedangkan, Unit Usaha Syariah yang membukakan kantor jasa layanan untuk perbankan syariah dari tahun 2009 sebesar 287 kantor meningkat menjadi 87,76% ditahun 2015 menjadi 327 kantor cabang dengan rata-rata 23 unit usaha konvensional yang membuka UUS. Peluang ini juga tidak disia-siakan oleh

lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-S) dari jumlah bank layanan syariah ditahun 2009 jumlah sebesar 138 bank meningkat menjadi 85,71% ditahun 2015 yaitu sebesar 327 bank. Disamping peningkatan jumlah bank yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Sampai tahun 2003 (sebelum fatwa MUI) kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu) baru mencapai 318 kantor, namun setelah keluarnya fatwa MUI jumlah kantor bertambah menjadi 2.881 kantor, atau meningkat sekitar 111,3 persen ditahun 2015. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan bank Indonesia yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah ibukota propinsi, penyempurnaan kebijakan terkait office channelling, dan kebijakan sosialisasi akselerasi perbankan syariah.

Peningkatan kinerja dapat kita lihat dari total pendapatan dari seluruh lembaga keuangan syariah pada tahun 2009 sebesar 8,975 M dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 sebesar 32,98 % atau sebesar 27,207 M. Namun pendapatan pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 1,1% atau sebesar 2,5 M menjadi 24,7 ditahun 2014. Selama 7 tahun aktivitas perbankan syariah dari tahun 2009-2015 dalam sejarah peningkatan pendapatan di tahun 2013 merupakan pendapatan yang paling signifikan sebesar 27,207 menurut catatan dari OJK.

Secara umum ini merupakan proses pemulihan perekonomian global, walaupun di beberapa bagian dunia masih ada yang justru baru memasuki krisis keuangan dan perekonomian. Namun secara umum arah perkembangan perekonomian pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dari pada tahun 2016. Terlebih untuk kinerja perekonomian Indonesia dengan tingkat konsumsi domestik relatif tinggi dan kelas menengah yang meningkat serta ditunjang oleh kondisi makro ekonomi yang relatif terjaga dengan baik, merupakan beberapa faktor penyebab perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perekonomian global. Begitu pula dengan perbankan syariah nasional, relatif tidak begitu signifikan mengalami dampak krisis ekonomi global pada awal tahun 2012 sejalan dengan fokus perbankan Indonesia yang lebih tertuju kepada pasar domestik yang masih besar, serta potensi pangsa perbankan syariah yang masih tinggi di

Indonesia, dengan pangsa pasar sampai dengan akhir tahun 2012 telah mendekati 5%.

**Tabel. 2 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2009-2015**

Keterangan	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah							
-Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12*
-Jumlah Kantor	711	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.1
Unit Usaha Syariah(UUS)							
-Jumlah Bank Umum	25	23	24	24	23	22	22*
Konvensional yang Memiliki UUS							
-Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	327*
Pembiayaan Rakyat Syariah							
-Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	161*
-Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	433*
<b>Total Kantor</b>	<b>1.2</b>	<b>1.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.6</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>
<b>Total Kantor</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>01</b>	<b>63</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>81*</b>

Keterangan \* artinya angka sementara

Sumber: data OJK, 2015

**Tabel.3 Laba Rugi Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2009-2015 (dalam Miliar Rupiah)**

Keterangan	Tahun						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Pendapatan	8.9	11.	2.1	17.	27.	24.	13.1
Total Beban	75	119	44	734	207	712	02*
Laba setelah pajak penghasilan	8.1	9.8	1.8	14.	22.	22.	11.8
	43	18	54	312	843	663	91*
	76	1.0	23	2.4	3.2	1.0	1.31
	9	28	9	66	30	04	7*

Keterangan \* artinya angka sementara

Sumber: data OJK, 2015

Sehingga sudah jelas bahwa berdasarkan data pendukung diatas bahwa

perkembangan perbankan syariah harus didukung dengan peraturan yang dapat melindungi kegiatan operasional baik dalam bentuk penyediaan fasilitas baik infrastruktur fisik maupun non fisik, ketersediaan lembaga pendidikan yang dapat menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dibidang perbankan syariah, dan hingga bantuan modal bergulir kepada lembaga-lembaga keuangan syariah baru sebagai pengembangan untuk bisa bersaing dikancah regional dan internasional. Pemerintah sebagai koordinasi penyuksesan cita-cita dalam pembukaan UUD'45 keadilan sosial bagi seluruh bangsa lebih sejahtera "gemah ripa loh jenawi". Artinya yang tersurat adalah kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya dan Umumnya kehidupan umat manusia di sektor ekonomi dengan tujuan yang jelas dengan pondasi hukum melalui UU hingga peraturan Pemerintah melalui "paket V kebijakan ekonomi".

**KESIMPULAN**

a. Kekuatan, yang dimiliki oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia melalui UU dan paket V kebijakan ekonom adalah diantaranya: pertama, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kondisi ini merupakan prospek pasar yang sangat potensial. Lebih-lebih kehadiran bank syariah di Indonesia sudah sangat lama dinanti-nantikan. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam program strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1990 dan bahkan sebelum itu dalam perjuangan penajng para cendekiawan muslim yang mencita-citakan berdirinya lembaga perekonomian umat yang beroperasi berdasarkan syariah. Kedua, komitmen dan dukungan dari pemerintah, khususnya otoritas perbankan (Bank Indonesia). Hal ini dapat dilihat pada (1) diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberi peluang berdirinya bank bagi hasil dan (2) diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1992 dan Sk Dir. BI No. 32/34Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi syariah dan nomor 32/36/Kep/Dir/1999 tentang BPR dan "paket V itu sendiri" berdasarkan prinsip syariah uang didalam pasal-

pasalnya secara tegas menyebutkan bank syariah. Ketiga, dukungan lembaga keuangan Islam dari keseluruhan dunia yang tergabung dalam *Islamic Development Bank* (IDB). Keempat, konsep yang melekat (*build in concept*) pada bank syariah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

- b. Kelemahan, yang dirasakan ada beberapa kelemahan seperti misalnya: pertama, kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah, di antaranya kelompok masyarakat dan banking syariah, seperti: (1) Kontroversi tentang bunga dan riba. (2) Kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan akrual. (3) Kontroversi tentang perhitungan bagi hasil atas dasar *profit* dan *loss sharing* dan *revenue sharing*. (4) Kontroversi tentang perhitungan margin harga jual bank pada akad *mudharabah*, *ba'i bithaman ajil*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dan lain-lain. Kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah (rata-rata baru 11%). Ketiga, masih terbatasnya jaringan pelayanan bank syariah dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi. Keempat, keberhasilan sistem bagi hasil sangat tergantung pada kejujuran nasabah dan bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad baik. Kelima, sangat memerlukan kecermatan menghitung bagi hasil terutama untuk nasabah/anggota yang jumlah simpanannya tidak pernah tetap. Keenam, sistem bagi hasil sangat memerlukan kecermatan dalam menghitung di banding dengan sistem konvensional. Ketujuh, Bank syariah masih dihitung baru sehingga masih memerlukan waktu bagi warga masyarakat untuk beradaptasi. Ini semua yang bisa dikembangkan untuk waktu-waktu yang akan datang guna memberikan hal yang positif dari penerapan aplikasi "paket kebijakan V" di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

<http://www.feb.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/RPM-FEB-UI->

- Quarterly-Report-2016-Vol.-1.pdf (diakses 8/1/2017).  
<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?> (diakses 8/1/2017).  
[http://www.bappenas.go.id/files/3814/4653/6309/Paket\\_Kebijakan\\_Ekonomi\\_Jilid\\_5.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/3814/4653/6309/Paket_Kebijakan_Ekonomi_Jilid_5.pdf) (diakses 8/1/2017)  
 Yuli Andriansyah. 2009. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.III. No(2). Hal:181-196.  
 A.A.Miftah. 2011. Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Perekonomian di Jambi. *Jurnal Innovation*. Vol.X. No(2). Hal:225-241.  
 Ali Rama. 2013. Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Artikel. [https://www.researchgate.net/publication/295100352\\_perbankan\\_syariah\\_dan\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_indonesia](https://www.researchgate.net/publication/295100352_perbankan_syariah_dan_pertumbuhan_ekonomi_indonesia) (diakses 11/1/2017)  
 Muhammad Putra Rizki, dan Fakhuddin. 2015. Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.II. No(1). Hal:42-55  
[http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/syariah/Documents/e62979903c40404095ba3c224baef8b3LPS\\_2013.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/syariah/Documents/e62979903c40404095ba3c224baef8b3LPS_2013.pdf) (diakses 11/1/2017).  
 Halim Alamsyah. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Artikel- Milad Ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). [http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/TantanganDalamMenyongsongMEA2015\\_HA.aspx](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Pages/TantanganDalamMenyongsongMEA2015_HA.aspx) (diakses 9/1/2017).  
 Muhamad Afdi Nizar. 2007. Performance Of Syaria'h Banking In Indonesia. MPRA Paper No.65613. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. vol.11. No(4). Hal:1-28 [https://mpa.ub.uni-muenchen.de/65613/1/MPRA\\_paper\\_65613.pdf](https://mpa.ub.uni-muenchen.de/65613/1/MPRA_paper_65613.pdf) (diakses 9/7/2017)  
<http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015.pdf> (diakses 9/1/2017).